



**Politik Dinasti dalam Perspektif Masyarakat Perkotaan  
(Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2024)**

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Budiharjo Universitas Lampung <a href="mailto:naminabudi68@gmail.com">naminabudi68@gmail.com</a> +62 813-6971-1998	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Ari Darmastuti Universitas Lampung <a href="mailto:ari.darmastuti@fisip.unila.ac.id">ari.darmastuti@fisip.unila.ac.id</a>	
R. Sigit Krisbintoro Universitas Lampung <a href="mailto:sigit.krisbintoro@fisip.unila.ac.id">sigit.krisbintoro@fisip.unila.ac.id</a>	
Bendi Juantara Universitas Lampung <a href="mailto:bendi.juantara@fisip.unila.ac.id">bendi.juantara@fisip.unila.ac.id</a> 082376331998	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

**Saran Penulisan Referensi:**

Budiharjo, Darmastuti A., Krisbintoro, R. S., & Juantara, B. (2025). Politik Dinasti dalam Perspektif Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 605 -617.

**Abstrak**

Proses pencalonan Gibran Rakkuming Raka menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden PrabowoSubianto pada pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 diwarnai oleh persoalan syarat GibranRakabuming Raka yang melanggar ketentuan persyaratan calon. Berdasarkan Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan presiden/wakil presiden, dinyatakan bahwa syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90 tahun 2023, persyaratan calon presiden/wakil presiden tersebut di rubah menjadi syarat usia calon presiden/wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara yang diperoleh melalui pemilihan umum. Keputusan MK ini dianggap kontroversial dan memicu kegaduhan, karena dianggap melanggar. Melanggar karena proses Keputusan tersebut melibatkan Ketua MK (hakim) Usman yang notabene adalah pamannya Gibran. Kemudian pelanggaran lainnya adalah melanggar ketentuan *open legalpolicy*. Lahirnya Keputusan MK ini dianggap sebagai politik dinasti, namun pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, pasangan PrabowoSubianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak, yaitu 58,59% secara nasional, 69,5% tingkat provinsi Lampung, dan 61,2% di Tingkat kota Bandar Lampung. Yang menarik adalah walaupun proses pencalonan Gibran yang banyak mendapat sorotan dan penolakan dari masyarakat, namun ketika dilakukan pemilihan, kemenangannya sangat signifikan. Setelah dilakukan penelitian tentang perspektif politik dinasti pada masyarakat perkotaan, studi di Bandar Lampung pada pemilu presiden/wakil presiden tahun 2024, diperoleh hasil bahwa 89% masyarakat Bandar Lampung memahami bahwa politik dinasti adalah tidak baik, dan merusak demokrasi. Namun Ketika dilakukan pemilihan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkalahkan oleh adanya politik gentong

babi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perspektif masyarakat tidak berkorelasi dengan perilakunya atau distorsi. Untuk itu diperlukan usaha yang massif untuk mendorong agar perilaku masyarakat lebih cerdas, yaitu memahami bahwa keputusan politik yang dibuatnya akan berdampak baik atau buruk bagi masa depan bangsanya.

**Kata Kunci:** Perspektif, politik dinasti, Masyarakat perkotaan

### Abstract

The nomination process of Gibran Rakabuming Raka as a vice-presidential candidate alongside presidential candidate Prabowo Subianto in the 2024 presidential/vice-presidential election was marked by issues regarding Gibran Rakabuming Raka's qualifications, which violated the candidate requirements. According to Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 on presidential/vice-presidential elections, it is stated that the minimum age requirement for a presidential or vice-presidential candidate is 40 years old. However, through the Constitutional Court's (MK) Decision No. 90 of 2023, this requirement was changed to require presidential/vice-presidential candidates to be at least 40 years old or have experience as a state organizer obtained through a general election. This MK Decision was considered controversial and sparked chaos because it was seen as a violation. It was violated because the decision-making process involved the Chief Justice of the Constitutional Court (judge) Usman, who happens to be Gibran's uncle. Another violation is the breach of the open legal policy. The birth of this MK Decision was seen as a dynastic politics move, yet in the 2024 presidential and vice-presidential election, the pair of Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka received the highest number of votes, with 58.59% nationwide, 69.5% in Lampung province, and 61.2% in Bandar Lampung city. Interestingly, although Gibran's nomination process faced significant scrutiny and public rejection, his victory was quite significant in the election. A study on the perspective of dynastic politics in urban society, conducted in Bandar Lampung during the 2024 presidential/vice-presidential election, found that 89% of the people in Bandar Lampung understood that dynastic politics is detrimental and damages democracy. However, when it came time to vote, the public's knowledge and understanding were overshadowed by political tactics (referred to as "gentong babi" politics). This situation shows that the public's perspective does not correlate with their behavior or reflects distortion. Therefore, massive efforts are needed to encourage more intelligent behavior from the public, so they understand that the political decisions they make will have a positive or negative impact on the future of the nation.

**Keywords:** Perspective, dynastic politics, urban society

## A. Pendahuluan

Politik dinasti merupakan warisan kekuasaan tradisional yang telah ada di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Sejak era autokrasi, ikatan geneologis digunakan sebagai dasar regenerasi politik guna melanggengkan kekuasaan. Jejak sejarah dinasti politik dalam tatanan pemerintahan terekam dalam Yupa atau prasasti yang dipahat pada tugu batu tentang Kerajaan Kutai di Kalimantan pada abad ke-5 Masehi. Warisan takhta kerajaan pertama diberikan oleh Aswawarman kepada putranya yang bernama Mulawarman. Dalam catatan sejarah inilah bukti tertulis paling awal tentang dinasti politik di Indonesia masa silam.

Pewarisan kekuasaan kepada keluarga pada periode autokrasi memiliki satu tujuan yang tegas, yakni mengamankan kedudukan keluarga di tengah kehidupan sosial dan politik saat itu. Bagi raja yang tidak memiliki anak laki-laki, takhta kerajaan tetap diwarisi kepada keluarga terdekat. Namun, sistem warisan jabatan ini tak jarang mengalami kegagalan karena pengganti yang kurang cakap atau adanya serangan dari kerajaan lain. Ruh politik dinasti di Indonesia tumbuh subur pada pemerintahan kolonialisme, yaitu dengan cara memberikan hak istimewa kepada Residen, Bupati, Wedana berupa warisan jabatan, hak pendidikan, dan hak ekonomi. Kebijakan ini di ambil untuk menarik hati pejabat daerah sehingga mereka setia kepada pemerintahan kolonial.

Pada masa orde baru, politik dinasti masih bertumbuh, yaitu dengan menempatkan anak, menantu, adik dan saudara-saudara dari "Keluarga Cendana" sebagai pejabat dipemerintahan seperti diusulkannya Titiek Soeharto menjadi wakil ketua MPR oleh Partai Golkar, Siti

HardiyantiRukmana (Mba Tutut ) di angkat menjadi Menteri Sosial pada Kabinet VII presiden Soeharto. Dinasti politik di Indonesia pasca reformasi juga mengalami pertumbuhan. Pada level nasional ada dinasti Soekarno-Megawati-Puan Maharani, Prabowo-HasyimDjoyohadikusumo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Agus Harimurti SBY, dan lain-lain. Pada level daerah dinasti politik juga bertumbuh, seperti contoh dinasti Fuad di Bangkalan Jawa Timur, dinasti Hasan Sochib di Banten, dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, dinasti Sachrudin di Lampung, dan dinasti Narang di Kalimantan Tengah.

Upaya untuk mencegah terjadinya dinasti politik atau politik dinasti sesungguhnya sudah dilakukan, yaitu dengan diterbitkannya UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini dimaksudkan agar kompetisi dalam pemilihan kepala daerah berlangsung secara adil, dan terjadi rotasi kepemimpinan secara demokrasi dan kompetitif. Pada pasal 7 UU tersebut di nyatakan sebagai berikut “ bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Calon kepala daerah tidak boleh memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan garis keturunan pada satu tingkatan ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana”.Hubungan yang dimaksud adalah ayah, ibu, paman, mertua, bibi, kakak, adik, ipar dan menantu.Pencalonan mereka baru dapat diterima jika terdapat jeda setelah petahana melewati jabatannya.Pada TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bangsa Indonesia berkomitmen untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang marak terjadi pada masa orde baru. Dengan kata lain bahwa semangat memberantas KKN adalah semangat dasar dari gerakan reformasi tahun 1998.

Praktek politik dinastiyang sangat merendahkan martabat bangsa adalah pada kasus Gibran Rakabuming Raka anak presiden JokoWidodo. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan ini dilakukan dengan cara melemahkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang di atur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf q yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun di revisi oleh MK karena ada gugatan dari seorang mahasiswa Bernama Almas Tsaqibirru dari Universitas Surakarta. Kemenangan gugatan Almas melalui Surat Keputusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menjadi dasar Gibran dapat dicalonkan menjadi wakil presiden berpasangan dengan calon presiden PrabowoSubianto. Di tengah hirup pikuknya pencalonan Prabowo-Gibran sebagai calon preisden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024, Sebagian besar masyarakat menganggap pencalonan tersebut cacat hukum, karena melanggar UU, dan terlebih lagi Nampak bahwa ada kecurangan, bahkan kejahatan yang di tunjukkan oleh pencalonan Gibran tersebut. Kejahatan tersebut dapat di identifikasi pada perubahan aturan UU yang dilakukan oleh MK yang dianggap melanggar ketentuan. Di sisi lain pelanggaran/kejahatan di lihat dari sisi keterlibatan paman Gibran sebagai Ketua MK dalam memutus gugatan Almas yang mengabulkan gugatan tersebut. Keterlibatan seorang hakim yang ikut memutus sengketa yang memiliki hubungan keluarga dengan obyek sengketa adalah sebuah pelanggaran.Namun keputusan MK justru melawan ketentuan yang berlaku, dan menjadi dasar bagi Gibran untuk dapat dicalonkan sebagai wakilpresiden.Dengan keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 maka polemik aturan pencalonan presiden dan wakil presiden dinyatakan selesai.

Pemilu presiden dan wakil preisden tahun 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada Rabu, 14 Februari tahun 2024.Dan berdasarkan hasil pemilu tersebut, Prabowo-Gibran sebagai pasanagn calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua (2) dinyatakan menang karena memperoleh suara terbanyak. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024

No	Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden	Perolehan Suara	%
1	Anies Baswedan- A. Muhaimin Iskandar	40.971.906	24.95
2	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	96.214.691	58.59
3	Ganjar Pranowo - Mahfud MD	27.050.878	16,47

Sumber : KPU di olah 2024

Berdasarkan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan total suara sebanyak 96.214.691, atau sekitar 58,59% dari seluruh suara yang sah. Pasangan ini menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara yang signifikan. Di posisi kedua terdapat

pasangan Anies Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar, yang meraih 40.971.906 suara atau sekitar 24,95%. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menempati posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 27.050.878, yang setara dengan 16,47% dari total suara. Hasil ini menggambarkan peta politik pada pemilu tahun 2024, dengan pasangan Prabowo-Gibran unggul jauh dibandingkan dengan pasangan lainnya.

Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Provinsi Lampung

No	Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden	Perolehan Suara	%
1	Anies Baswedan - A. Muhaimin Iskandar	791.892	15,50
2	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	3.554.310	69,50
3	Ganjar Pranowo - Mahfud MD	764.486	15,0

Sumber : KPU Provinsi di olah 2024

Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Provinsi Lampung menunjukkan dominasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang meraih perolehan suara terbanyak sebanyak 3.554.310 suara, atau sekitar 69,50% dari total suara yang sah di provinsi tersebut. Pasangan ini unggul dengan persentase yang sangat signifikan. Di posisi kedua, pasangan Anies Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar memperoleh 791.892 suara, yang setara dengan 15,50% dari total suara. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menempati posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 764.486, atau 15,0% dari suara yang sah. Hasil ini mencerminkan preferensi pemilih di Provinsi Lampung pada pemilu 2024, di mana pasangan Prabowo-Gibran memperoleh dukungan mayoritas.

Tabel 3. Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung

No	Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden	Perolehan Suara	%
1	Anies Baswedan - A. Muhaimin Iskandar	354.300	29,90
2	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	172.990	61,10
3	Ganjar Pranowo - Mahfud MD	52.163	9,00

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung di olah 2024

Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh perolehan suara terbanyak dengan 172.990 suara, yang setara dengan 61,10% dari total suara sah di kota ini. Pasangan ini menduduki posisi pertama dengan dukungan mayoritas. Di posisi kedua, pasangan Anies Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar meraih 354.300 suara atau 29,90%, sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di posisi ketiga dengan 52.163 suara atau 9,00%. Hasil ini menggambarkan bahwa meskipun pasangan Prabowo-Gibran mendominasi, pasangan Anies-A. Muhaimin masih memperoleh dukungan signifikan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan table di atas, perolehan suara pasangan urutan nomor satu Prabowo-Gibran memperoleh suara yang sangat signifikan, baik tingkat nasional, provinsi Lampung dan di kota Bandar Lampung. Sementara tentang politik dinasti pada umumnya mendapat reaksi negatif yang kuat apalagi di kalangan masyarakat perkotaan dan masyarakat terdidik, sehingga penelitian tentang politik dinasti pada masyarakat perkotaan, studi di kota Bandar Lampung menarik untuk dilakukan.

Memperhatikan praktek politik dinasti yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, maka peneliti tertarik untuk meneliti politik dinasti dalam perspektif masyarakat perkotaan. Masyarakat kota dianggap melek pendidikan dan secara ekonomi relative lebih baik dibanding masyarakat perdesaan. Dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang sudah baik, asumsinya adalah mereka memiliki budaya politik partisipan merujuk pendapat Gabriel Almond, atau masyarakat yang cerdas yang dalam membuat keputusan politik bersifat independent berdasarkan kemampuan intelektualitasnya. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik dinasti dalam perspektif masyarakat perkotaan pada pemilu presiden tahun 2024 ( studi di kota Bandar Lampung).

## B. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **kualitatif**, yang bertujuan untuk menggali perspektif masyarakat perkotaan terhadap fenomena politik dinasti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam tentang pandangan, sikap, dan alasan masyarakat terhadap politik dinasti yang terjadi di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, di mana peneliti akan mengkaji fenomena politik dinasti dalam konteks lokal di Kecamatan Kemiling. Penelitian ini berfokus pada pemahaman persepsi masyarakat terhadap pengaruh politik dinasti dalam kehidupan politik lokal serta dampaknya terhadap proses demokrasi di wilayah tersebut.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan area perkotaan dengan dinamika politik yang aktif, serta memiliki keterkaitan dengan fenomena politik dinasti terkait calon pemimpin daerah.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a) Data primer: Data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi. Responden penelitian terdiri dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kemiling, dengan berbagai latar belakang, baik dari kalangan pemilih, tokoh masyarakat, maupun aktivis politik lokal.
- b) Data sekunder: Data yang diperoleh melalui dokumen, laporan, dan literatur yang relevan mengenai politik dinasti serta tinjauan teori demokrasi dan politik di Indonesia.

### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik-teknik berikut:

- a) Wawancara mendalam (in-depth interview): Wawancara dilakukan dengan beberapa informan utama, seperti tokoh masyarakat, aktivis politik, dan pemilih di Kecamatan Kemiling. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan pribadi mereka tentang politik dinasti.
- b) Diskusi kelompok terarah (FGD): FGD diadakan dengan kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang politik yang berbeda. FGD ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai persepsi masyarakat terhadap politik dinasti.
- c) Observasi partisipatif: Peneliti juga akan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan politik yang berkaitan dengan politik dinasti di Kecamatan Kemiling, baik dalam kampanye, pertemuan, maupun peristiwa politik lainnya.

### 5. Teknik analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Transkripsi hasil wawancara dan FGD.
- b) Kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul terkait dengan politik dinasti, seperti persepsi masyarakat, dampak politik dinasti, dan hubungan antara politik dinasti dengan demokrasi.
- c) Penafsiran data untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema.
- d) Penyusunan temuan berdasarkan kategori yang telah dianalisis.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil

#### a) Profil Koresponden

Penelitian perspektif masyarakat terhadap dinasti politik dengan jumlah responden yang menjadi sumber data primer sebanyak 100 responden. Profil responden dalam penelitian ini meliputi; usia responden, pekerjaan responden, jenis kelamin responden, dan pendidikan terakhir responden. Berdasarkan hasil survey, berikut gambaran profil responden yang didapatkan:

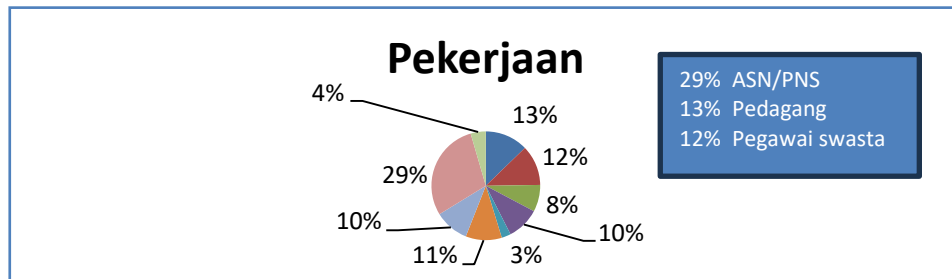


Figure 1. Profil responden berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian terbesar adalah ASN/PNS sebanyak 29%, sedangkan yang lainnya cukup merata diangka mendekati 10% responden dengan pekerjaan sebagai pedagang, karyawan swasta, sedangkan responden paling kecil dari kalangan buruh dan ibu rumah tangga.

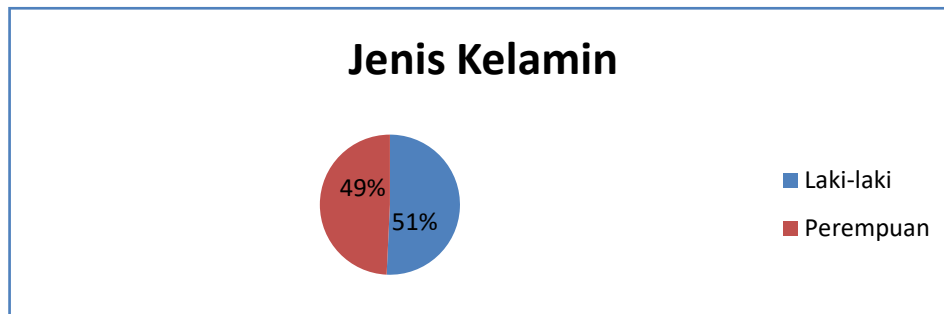
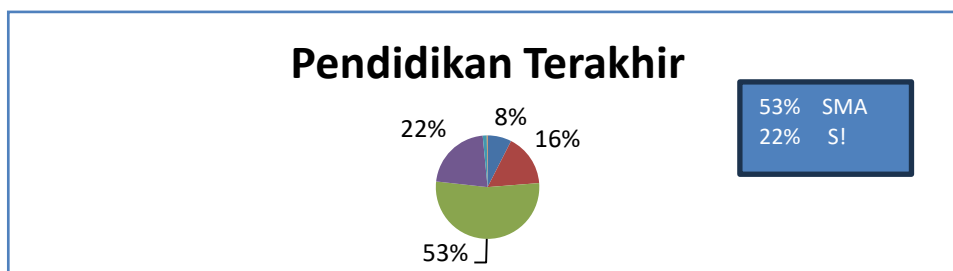


Figure 2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar 5.2 distribusi responden berdasarkan jenis kelamin terbagi mendekati proporsional jenis kelamin, yaitu 51% reponden berjenis kelamin laki-laki, selebihnya 49% reponden berjenis kelamin perempuan.



Berdasarkan gambar 5.3 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah reponden berpendidikan SMA sebanyak 53%, berpendidikan S1 sebanyak 22%, dan berpendidikan S2sebanya 16%, sedangkan yang berpendidikan SMP 8%

b) Perspektif Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Persoalan Politik Dinasti Pada Pemilu Tahun 2024

Tabel 4. Perspektif Masyarakat Terhadap Dinasti Politik

No	Pernyataan	NI	NIK	MP	KUP
1	Pengetahuan responden tentang dinasti politik	3,1	77,5	B	Baik
2	Pengetahuan responden tentang tujuan dinasti politik	3,15	78,75	B	Sangat Baik
3	Pemilihan pemimpin harus demokrasi	3,57	89,25	A	Sangat Baik
4	Pemimpin memiliki kecakapan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	3,54	88,5	A	Sangat Baik
5	Pemimpin memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	3,7	92,5	B	Sangat Baik
6	Pemimpin tumbuh melalui proses dan tahapan	3,7	92,5	A	Sangat Baik

7	Pemimpin yang baik menjadi besar karena dirinya bukan fasilitas orang tuanya	3,6	90,0	A	Sangat Baik
8	Pemimpin harus disiplin dan menjadi tauladan	3,57	89,25	A	Sangat Baik
<b>TOTAL/Rata-rata</b>		3,49	87,28	B	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024, data diolah

Berdasarkan Hasil penelitian perspektif masyarakat di Bandar Lampung, menunjukkan bahwa dari 8 pernyataan pada kuisioner, pengetahuan responden tentang dinasti politik mendapatkan nilai NIK (Nilai Interval Konversi) sebesar 77,5 berada pada kategori baik. Pengetahuan responden tentang tujuan dinasti politik mendapat nilai perspektif 78,75, Pemilihan pemimpin harus demokrasi 89,25, Pemimpin memiliki kecakapan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan 88,5, Pemimpin memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan 92,5, Pemimpin memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan 92,5, Pemimpin tumbuh melalui proses dan tahapan 92,5, Pemimpin yang baik menjadi besar karena dirinya bukan fasilitas orang tuanya 90,0, Pemimpin harus disiplin dan menjadi tauladan 89,25.

Yang menarik dari data ini adalah bahwa pengetahuan responden tentang dinasti politik termasuk baik, yaitu di angka 77,5 dan 78, 75. Namun ketika mengungkapkan tentang pemimpin yang baik dan menjadi besar harus karena potensinya sendiri bukan mendapatkan fasilitas dari orang tuanya (privilege orang tua) diangka 90,0, maka hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya responden atau mewakili masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa kekuasaan yang turun temurun adalah ditolak oleh masyarakat. Masyarakat memandang bahwa pemilihan umum adalah proses pergantian pemimpin yang harus dilakukan secara demokratis, dengan memandang kandidat berdasarkan kecakapannya, pengalamannya, dan potensi yang dimilikinya. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian sebagai berikut.

2. Pembahasan

a) Aspek kognitif, dan Afektif

Aspek kognitif adalah berkaitan dengan pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh Masyarakat tentang sesuatu, dalam hal ini adalah tentang dinasti politik. Dari jawaban responden terhadap kuisioner yang di ajukan, yaitu “apakah saudara tahu dan mengerti tentang dinasti politik?”. Maka terpetakan bahwa masyarakat pada umumnya tahu dan mengerti makna dari dinasti politik. Hal ini terlihat dari jawaban responden sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Pengetahuan responden tentang dinasti politik

NO	KUISIONER	Sangat Tahu	Tahu	Tidak Tahu	Sangat Tidak Tahu
1	Apakah saudara tahu makna dinasti politik	5%	82%	13%	0

Sumber data : Hasil penelitian 2024, data diolah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa 87% responden menyatakan tahu makna dari dinasti politik. Untuk memastikan pengetahuan responden tentang dinasti politik, maka peneliti meminta beberapa responden untuk menjelaskan tentang dinasti politik yang mereka ketahui. Siswanto, warga di kelurahan Beringin Raya Kemiling menjelaskan sebagai berikut :

“Dinasti politik adalah pewarisan kekuasaan secara turun temurun, dari seorang bapak kepada anak-anaknya, atau kepada istrinya, atau kepada kerabat dekatnya. Dinasti politik bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki agar tidak jatuh kepada orang lain.” (Siswanto, 2024)

Responden lain, Asikin warga Bukit Kemiling Permai juga menyatakan hal yang hamper sama pada prinsipnya yaitu :

“Dinasti politik adalah usaha mewariskan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang dimiliki dari bapak kepada anak atau kerabatnya, seperti jaman kerajaan dulu” (Asikin, 2024)

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Dedi warga kelurahan Sumber Rejo, dia mengatakan bahwa :

“Dinasti politik adalah proses mewariskan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua kepada anaknya atau kerabat dekatnya seperti kepada adiknya, kakaknya atau paman, bibi dan lain-lain”. (Dedi; 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa responden penelitian memiliki pengetahuan dan memahami makna dari dinasti politik yang dimaksud dalam penelitian ini.

b) Pengetahuan responden tentang tujuan dinasti politik

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pengetahuan responden tentang tujuan dinasti politik, dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 6. Pengetahuan responden tentang dinasti politik

NO	KUISIONER	Sangat Tahu	Tahu	Tidak Tahu	Sangat Tidak Tahu
1	Apakah saudara tahu tujuan dinasti politik	5 %	84%	11%	0

Sumber data : Hasil penelitian 2024, data diolah

Dari table tersebut dapat terlihat bahwa responden yang sangat tahu dan tahu tujuan dari dinasti politik adalah 89 %, dan yang tidak tahu dan sangat tidak tahu sebesar 11%. Berarti nilai jawaban tentang hal ini tergolong sangat baik. Hal ini menandakan bahwa secara umum responden mengetahui dan paham tentang tujuan dari dinasti politik. Untuk menelusuri lebih jauh pemahaman responden tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan responden tentang tujuan dinasti politik. Siswanto, warga kelurahan Beringin Raya memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Tujuan dinasti politik yang saya pahami adalah usaha dari pemilik kekuasaan agar kekuasaannya tetap berada di tangan keluarga, atau kerabatnya. Para penguasa menyadari betapa anaknya memiliki kekuasaan, makanya kalo bisa dipertahankan dengan cara membuat dinasti politik, menyiapkan kader dari anak-anaknya atau kerabatnya”. (Siswanto, Agustus 2024)

Pada kesempatan yang lain, Asikin warga kelurahan Bukit Kemiling Permai mengatakan hal yang hamper sama dengan yang dikemukakan oleh Siswanto, yaitu sebagai berikut :

“ Dinasti politik itu adalah usaha para pemilik kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaannya kepada keluarganya, anak-anaknya, atau kerabat dekat lainnya agar kekuasaan itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Mereka merasakan nikmatnya memiliki kekuasaan, jadi jangan sampai direbut oleh orang lain”. (Asikin, Agustus 2024)

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Siswanto dan Asikin, Dedi warga kelurahan Sumber Rejomengatakan :

“Tujuan dinasti politik adalah mewariskan kekuasaan yang dimilikinya kepada keluarga, anak-anak dan kerabat lainnya. Tujuannya untuk melanjutkan program program pembangunan, namun menurut saya itu cuma alasan saja, sebetulnya mereka masih pengen merasakan kekuasaan itu. Bagi saya dinasti politik itu ga bagus”. (Dedi, Agustus 2024)

Dari jawaban hasil kuisisioner dan wawancara dengan responden tersebut maka dapat dikatakan bahwa responden pada umumnya tahu dan mengerti tujuan dari dinasti politik, dan menunjukkan rasa tidak senang dengan adanya dinasti politik.

c) Pemilihan pemimpin harus demokrasi

Untuk mengetahui pemahaman dinasti politik responden, maka ditanyakan kepada responden tentang pemilihan pemimpin harus demokratis. Berdasarkan jawaban responden maka dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 7. Pemilihan pemimpin harus demokratis

NO	KUISIONER	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak
1	Pemilihan pemimpin harus demokratis	34%	52%	14%	0	0	

Sumber data : Hasil penelitian 2024, data diolah

Dari jawaban responden diketahui bahwa 86% responden menyatakan bahwa pemilihan pemimpin harus demokratis sangat setuju dan setuju, dan 14% yang menyatakan terserah atau “iku saja”. Sementara responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang demokrasi dalam memilih pemimpin adalah bagus, mereka paham bahwa memilih pemimpin harus secara demokrasi. Untuk menindaklanjuti jawaban kuisisioner tersebut, peneliti mendalaminya melalui wawancara. Hasil wawancara dengan Siswanto, warga kelurahan Beringin Raya menyatakan bahwa :

“ Dalam memilih pemimpin memang harusnya dilakukan secara demokrasi, artinya semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, atau dicalonkan. Tidak boleh ada pembatasan, dan kesempatan nya hanya untuk elit-elit saja. Kemampuannya juga harus bagus dan juga harus punya pengalaman. Jika pemilihan pemimpin dilakukan secara demokratis maka menurut saya pemerintahannya akan bagus”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Asikin, warga Bukit Kemiling Permai sebagai berikut “Sekarang jamannya demokrasi, jadi untuk memilih pemimpin harusnya demokrasi. Demokrasi itu berarti semua orang memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Demokrasi juga artinya tidak politik dinasti, turun temurun”. (Asikin, Agustus 2024)

Responden yang lain, yaitu Dedi warga kelurahan Sumber Rejo juga mengatakan bahwa : “...sebagaimana ketentuan UUD 1945, maka kita menganut sistim demokrasi. Jadi untuk memilih pemimpin ya harus demokrasi, bukan mementingkan dan mendahulukan anak, kerabat atau keluarga terdekat, itu kan berarti nepotisme bukan demokrasi”. (Dedi, Agustus 2024)

Berdasarkan jawaban para responden tersebut, maka dapat di katakana bahwa responden memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik maupun pemerintahan harus demokrasi, dan menolak nepotisme.

d) Pemimpin harus memiliki kecakapan di bidang pemerintahan

Pernyataan tentang pemimpin harus memiliki kecakapan mendapat respon atau jawaban dari responden, sebesar 100% sangat setuju dan setuju, dan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada yang menjawab (kosong). Ini menandakan bahwa responden mengetahui dan memahami bahwa seorang pemimpin memang benar harus memiliki kecakapan. Kecakapan ini penting bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan kepemimpinannya. Kecakapan ini antara lain dapat dilihat dari jenjang pendidikan dan kemampuannya ketika berbicara dan menjelaskan tentang sesuatu, seperti ketika menjelaskan program atau visi misi yang akan di laksanakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Pemimpin harus memiliki kecakapan di bidang pemerintahan

NO	KUISIONER	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Pemimpin harus memiliki kecakapan dibidang pemerintahan	38%	52%	10%	0	0

Berdasarkan data hasil pemilihan menunjukkan bahwa 90% responden menyetujui bahwa pemimpin harus memiliki kecakapan di bidang pemerintahan, hanya 10% yang menjawab terserah atau seolah pasrah, sementara yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar (90%) responden paham bahwa pemimpin harus memiliki kecakapan di bidang pemerintahan. Untuk menggali pemahaman responden tentang hal ini, maka dilakukan wawancara kepada para responden. Jawaban responden tentang pemimpin harus memiliki kecakapan di bidang pemerintahan adalah sebagai berikut :

“Pemimpin harus memiliki kecakapan adalah penting sekali, pemimpin kan harus memberikan komando kepada rakyatnya, apa yang baik untuk dikerjakan agar masyarakatnya menjadi maju, sejahtera. Kalau pemimpinnnya ga punya kecakapan, susah

nanti bangsa ini mau di bawa kemana. Cakap ini artinya dia memiliki pengetahuan, atau keahlian di bidang pemerintahan”. (Siswanto, Agustus 2024)

Asikin juga mengungkapkan tentang pentingnya seorang pemimpin harus memiliki kecakapan, sebagai berikut :

“ ...jelas,...pemimpin harus memiliki kecakapan. Paling tidak kelihatan waktu ngomong di depan umum, bisa ga dia menjelaskan apa yang dia pikirkan untuk kemajuan Masyarakat ini. Bisa juga dilihat latar belakang pendidikan nya.Kalo pendidikannya dari sekolah atau perguruan tinggi yang bagus, maka akan terlihat juga kemampuannya”. (Asikin, Agustus 2024)

Pendapat Dedi juga menguatkan atas pendapat sebelumnya, bahwa :

“pemimpin itu harus cakap, artinya memiliki kemampuan secara keilmuan, mampu menyampaikan gagasan-gagasannya dan bagus, mudah dimengerti. Jadi pemimpin ya harus lebih baik dari masyarakatnya, maka kita bangga juga kalo pemimpin nya bagus”. (Dedi, Agustus 2024)

e) Pemimpin harus memiliki pengalaman di bidang pemerintahan

Pernyataan tentang pemimpin harus memiliki pengalaman di bidang pemerintahan mendapat respon dan jawaban dari responden sebagai berikut :

Tabel 9. Pemimpin harus memiliki pengalaman

NO	KUISIONER	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Pemimpin harus memiliki pengalaman	34%	58%	12%	0	0

Sumber data : Hasil penelitian 2024, data diolah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, 92% responden menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengalaman.Untuk mendapatkan Gambaran pengetahuan responden tentang hal ini, dilakukan wawancara. Hasil wawancara dengan Siswanto warga Beringin Raya sebagai berikut :

“Pemimpin harus mempunyai pengalaman maksudnya adalah bahwa pemimpin mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, atau pengalaman dalam berorganisasi, pengalaman dalam mengurus kemasyarakatan. Pengalaman seperti ini harus di lihat juga berapa lama seseorang berpengalaman mengurus organisasi atau pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan di pemerintahan maupun organisasi dia ikuti mulai dari anggota biasa sampai pada level yang tinggi, jadi perlu proses yang lama, baru dia matang”.

Pendapat tentang perlunya pengalaman bagi seorang pemimpin dikemukakan oleh Asikin warga Bukit Kemiling Permai sebagai berikut

“Pemimpin harus memiliki pengalaman, tentu hal ini sangat penting, karena orang yang berpengalaman dalam kegiatan pemerintahan atau organisasi, Ketika jadi pemimpin di pemerintahan akan cepat mengambil Langkah-langkah untuk memajukan masyarakat, dan paham apa yang menjadi aspirasi masyarakat.Orang yang berorganisasi akan bijak, cepat dalam mengambil kebijakan atau Langkah-langkah dalam mengatasi masalah, dan lain-lain”. (Asikin, Agustus 2024)

Penjelasan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dedi, sebagai berikut :

“Pemimpin harus berpengalaman, hal ini adalah sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan menjadi baik. Pengalaman ini adalah modal agar dia cepat mengambill tindakan, dan dengan pengalaman yang dia miliki, maka hal-hal yang buruk/tidak baik yang pernah dia lakukan akan dia hindari, dan pengalaman yang baik dia bisa lebih tenang, dan bijak dalam mengatasi persoalan.”. (Dedi, Agustus 2024)

f) Pemimpin yang baik “ menjadi besar “ melalui proses dan tahapan

Pemimpin yang baik “besar” melalui proses dan tahapan bukan karena fasilitas dari orang tua. Hasil penelitian tentang hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 9. Pemimpin yang baik “besar” melalui proses dan tahapan

NO	KUISIONER	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Pemimpin yang baik “besar” melalui proses dan tahapan	31%	52%	6%	11%	0

Sumber data : Hasil penelitian 2024, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa 83% responden mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin harus melalui proses dari bawah dan bertahap. Hanya 6% yang menjawab ragu-ragu atau terserah, sedangkan 11% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa masih ada jawaban 17 % yang tidak mantap tentang perlunya proses dan tahapan untuk menjadi pemimpin. Pada Masyarakat perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang menganggap bahwa menjadi pemimpin tidak harus melalui proses dan tahapan. Bisa saja karena mempunyai akses dia masuk menjadi pemimpin. Untuk memperoleh informasi yang lebih dalam tentang menjadi pemimpin tidak perlu melalui proses dan tahapan, peneliti mewawancarai Benny warga Beringin Jaya sebagai berikut :

“Menurut saya untuk menjadi pemimpin yang penting adalah dia mempunyai kemampuan, paling tidak sekolah dan kuliah di tempay yang bagus. Setelah itu jika ada peluang, apalagi ayahnya adalah pimpinan partai, maka boleh dong dia terjun ke politik. Apalagi dia memang sudah mempersiapkan diri melalui jalur sekolah dan kuliah untuk terjun ke politik”

Dari jawaban hasil wawancara tersebut, dapat di pahami bahwa pendapat responden tersebut cukup beralasan, karena dengan pengetahuan yang dia miliki melalui proses sekolah dan kuliah, maka hal itu sudah dianggap cukup. Dan menurut hemat penulis, hal ini dapat di terima, dan beralasan. Ketika ada orang tua yang menduduki jabatan baik itu di pemerintahan, di partai politik, maka orang tua merasa perlu mempersiapkan anak-anak nya terutama yang memiliki “fashion” di bidang politik, dan hal ini berarti sesungguhnya ada persiapan, ada proses dan tahapan. Yang menjadi persoalan adalah jika orang tua memaksakan anaknya untuk terjun ke politik, tetapi anak tidak memiliki pengetahuan dan persiapan untuk menduduki jabatan politik.

g) Pemimpin boleh melanggar peraturan

Seorang pemimpin adalah seorang panutan, tauladan bagi masyarakatnya, dan karenanya maka dia harus taat dan patuh terhadap peraturan yang ada. Untuk mengetahui bagaimana jawaban responden tentang hal ini, berikut akan disajikan jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 10. Pemimpin boleh melanggar peraturan

NO	KUISIONER	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
	Pemimpin tidak boleh melanggar aturan	68%	32%	0%	0%	0%

Sumber data : Hasil penelitian 2024, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa 100% responden menyatakan bahwa pemimpin tidak boleh melanggar aturan. Untuk mengetahui pemahaman responden, maka dilakukan wawancara kepada beberapa responden sebagai berikut :

“Pemimpin tidak boleh melanggar aturan, karena pemimpin kan harus jadi contoh atau teladan. Bagaimana kalau dia terbukti melanggar aturan, ga bisa lagi jadi contoh dong. Bisa-bisa nanti dia melanggar lagi. Apalagi kalau ini sudah menjadi karakter, maka ada kemungkinan dia melakukan pelanggaran- pelanggaran lagi. Wah bahaya”. (Siswanto, Agustus 2024)

Berdasarkan pada hasil jawaban kuisisioner dan wawancara mendalam dengan responden, menunjukkan bahwa Sebagian besar responden menghendaki pemimpin itu harus menjadi

contoh atau tauladan bagi masyarakatnya. Jika pemimpin melanggar maka akan terjadi pelanggaran yang meluas di Masyarakat, karena contohnya melakukan pelanggaran.

Tabel 11. Rekapitulasi Jawaban Narasumber

NO	KUISIONER	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Mutu Perspektif
1	Pengetahuan responden tentang dinasti politik	5%	82%	0	13%	0	Sangat Baik
2	Pengetahuan responden tentang tujuan dinasti politik	5 %	82%	13%	0	0	Sangat Baik
3	Pemilihan pemimpin harus demokrasi	34%	52%	14%	0	0	Sangat Baik
4	Pemimpin memiliki kecakapan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	38%	52%	10%	0	0	Sangat Baik
5	Pemimpin memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	31%	52%	6%	11%	0	Baik
6	Pemimpin tumbuh melalui proses dan tahapan	31%	52%	6%	11%	0	Sangat Baik
7	Pemimpin yang baik menjadi besar karena dirinya bukan fasilitas orang tuanya	68%	32%	0%	0%	0	Sangat Baik
8	Pemimpin harus disiplin dan menjadi tauladan	68%	32%	0%	0%	0	Sangat Baik

Sumber data : Hasil penelitian 2024, data diolah

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perspektif masyarakat di Kota Bandar Lampung terhadap politik dinasti pada Masyarakat perkotaan di kecamatan Kemiling kota Bandar Lampung tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat memandang tentang politik dinasti pada proses pemilihan umum adalah negative. Politik Dinasti merupakan proses politik yang dianggap tidak demokratis, tidak memberikan akses yang sama kepada setiap warga negara. Politikdinastikmerusak demokrasi karena tidak mempertimbangkan kemampuan, pengalaman dari calon pemimpin.Dinasti politik tidak sesuai dengan konstitusi negara UUD 1945. Namun pandangan masyarakat tentang politik dinasti adalah sesuatu yang tidak baik, pada faktanya ketika dilakukan pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2024, terjadi distorsi, artinya pandangan dan pengetahuan Masyarakat tentang demokrasi tidak ada korelasi dengan pilihan yang seharusnya juga bersifat otonom.

## E. Referensi

- AA Rahma. (2022). Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan. UPI Bandung. 2022.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177-191.
- Huntington, SP. 1991. *Gelombangdemokratisasi Ketiga*. Jakarta: PT. Intermedia.
- MH. S. (2017). Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 2017 - jurnal.umt.ac.id
- Mietzner, M. (2009). Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System. *Journal of Contemporary Asia*
- Sanjaya, Wina. (2015). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Synder, dkk. (2009). *Political Dynasties*. Los Angeles: The Review of Economic Studies (2009), Edisi: 76, hal. 115-142.
- Varma, SP. (2007). *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Press.